



**ANGGOTA JDIHN YANG WAJIB MEMILIKI LAMAN JDIH  
SESUAI AMANAT PERPRES 33 TAHUN 2012 TENTANG JDIHN  
(KONDISI : 28 JUNI 2022)**

Anggota JDIHN	Jumlah Anggota	Memiliki Website JDIH	Sudah Integrasi
Kementerian (di luar Kemenkumham)	33	33	33
Lembaga Negara	10	9	9
LPNK	31	30	26
Lembaga Non Struktural	40	16	13
Provinsi	34	34	34
Kabupaten	416	413	413
Kota	98	98	98
DPRD Provinsi	34	34	33
DPRD Kabupaten	415	389	389
DPRD Kota	93	93	93
<b>Total</b>	<b>1204</b>	<b>1149</b>	<b>1141</b>
<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>

**PTN/PTS YANG SUDAH MEMILIKI WEBSITE JDIH DAN  
TERINTEGRASI KE PORTAL JDIHN.GO.ID**

NO	INSTANSI	PROVINSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
1.	Universitas Pamulang	Banten	jdih.unpam.ac.id	Sudah
2	Universitas Sam Ratulangi	Sulawesi Utara	jdih.unsrat.ac.id	Sudah
3	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	Kalimantan Tengah	jdih.stihtb.ac.id	Sudah
4	Universitas Muhammadiyah Metro	Lampung	jdih.ummetro.ac.id	Sudah
5	Universitas Lampung	Lampung	jdih.unila.ac.id	Sudah
6	Universitas Bandar Lampung	Lampung	jdih.ubl.ac.id	Sudah
7	Universitas Lancang Kuning	Riau	jdih.unilak.ac.id	Sudah
8	Universitas Balikpapan	Kalimantan Timur	uniba-bpn.jdihn.go.id	Sudah
9	Universitas Tidar	Jawa Tengah	jdih.untidar.ac.id	Sudah
10	Universitas Pasir Pengaraian	Riau	jdih.upp.ac.id	Sudah

## PTN/PTS YANG SUDAH MEMILIKI WEBSITE JDIH DAN TERINTEGRASI KE PORTAL JDihn.GO.ID

NO	INSTANSI	PROVINSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
11.	STIH Awang Long	Kalimantan Timur	stih-awanglong.jdihn.go.id	Sudah
12.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	Kalimantan Timur	uwgm.jdihn.go.id	Sudah
13.	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah	jdih.upstegal.ac.id	Sudah
14.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	Lampung	jdih.umko.ac.id	Sudah
15.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	DKI Jakarta	jdih.unsurya.ac.id	Sudah
16.	Universitas Yarsi	DKI Jakarta	jdih.yarsi.ac.id	Sudah

PTN/PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR SEBANYAK 64

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
1.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman	-	-
2	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri	-	-
3	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan	-	-
4	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	-	-
5	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	-	-
6	Universitas 45 Surabaya	-	-
7	Universitas Abdurachman Saleh	-	-
8	Universitas Airlangga	-	-
9	Universitas Bakti Indonesia	-	-
10	Universitas Bhayangkara Surabaya	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
11.	Universitas Bojonegoro	-	-
12	Universitas Bondowoso	-	-
13	Universitas Brawijaya	-	-
14	Universitas Darul ulum	-	-
15	Universitas Dr Soetomo	-	-
16	Universitas Gresik	-	-
17	Universitas Hang Tuah	-	-
18	Universitas Islam Balitar	-	-
19	Universitas Islam Darul `ulum	-	-
20	Universitas Islam Jember	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
21.	Universitas Islam Kadiri	-	-
22	Universitas Islam Lamongan	-	-
23	Universitas Islam Madura	-	-
24	Universitas Islam Malang	-	-
25	Universitas Jember	-	-
26	Universitas Kadiri	-	-
27	Universitas Kanjuruhan	-	-
28	Universitas Kartini	-	-
29	Universitas Katolik Darma Cendika	-	-
30	Universitas Katolik Widya Karya	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
31.	Universitas Kristen Cipta Wacana	-	-
32	Universitas Lumajang	-	-
33	Universitas Maarif Hasyim Latif	-	-
34	Universitas Madura	-	-
35	Universitas Mayjen Sungkono	-	-
36	Universitas Merdeka Madiun	-	-
37	Universitas Merdeka Malang	-	-
38	Universitas Merdeka Pasuruan	-	-
39	Universitas Merdeka Ponorogo	-	-
40	Universitas Merdeka Surabaya	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
41.	Universitas Mochammad Sroedji	-	-
42	Universitas Muhammadiyah Jember	-	-
43	Universitas Muhammadiyah Malang	-	-
44	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	-	-
45	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	-	-
46	Universitas Muhammadiyah Surabaya	-	-
47	Universitas Narotama	-	-
48	Universitas Negeri Surabaya	-	-
49	Universitas Panca Marga	-	-
50	Universitas Pelita Harapan Surabaya	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
51.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	-	-
52	Universitas Soerjo	-	-
53	Universitas Sunan Bonang	-	-
54	Universitas Sunan Giri	-	-
55	Universitas Surabaya	-	-
56	Universitas Teknologi Surabaya	-	-
57	Universitas Trunojoyo	-	-
58	Universitas Tulungagung	-	-
59	Universitas Widya Gama	-	-
60	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	-	-

## PTN/ PTS YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	WEBSITE	STATUS TERINTEGRASI
61.	Universitas Wijaya Putra	-	-
62	Universitas Wiraraja	-	-
63	Universitas Wisnuwardhana	-	-
64	Universitas Yos Sudarso	-	-

## LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PASCA JDIH 100% TERINTEGRASI

- **MELENGKAPI KOLEKSI DOKUMEN HUKUM YANG DIUPLOAD DALAM WEBSITE JDIH**
- **MEMENUHI STANDAR PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM YANG BELUM TERPENUHI**
- **MENERAPKAN PENGGUNAAN *DIGITAL SIGNATURE* UNTUK DOKUMEN HUKUM KHUSUSNYA PERATURAN PERUNDANGAN**

**PORTAL JDIHN**

<https://jdihn.go.id>

JDIHN DOKUMEN HUKUM ANGGOTA KEGIATAN UNDUHAN FAQ MASUK

**Jdihn-go.id**

KHAZANAH DOKUMEN HUKUM INDONESIA  
**JDIHN**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

CARI DOKUMEN

Masukkan Kata Kunci

SILAHKAN CARI DOKUMEN

Jenis Nomor Tahun Instansi Status CARI Q

## KHAZANAH DOKUMEN HUKUM NASIONAL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Produk Hukum Tk Pusat	69.770
2	Produk Hukum Tingkat Daerah	274.325
3	Produk Hukum Era Kolonial	25.649
4	Monografi Hukum	21.561
5	Artikel / Majalah Hukum	23.654
6	Yurisprudensi / Putusan	4.353
7	Perjanjian/MoU	1.224
8	Dokumen Tingkat Perguruan Tinggi	1.312
9	Instrumen Internasional	83
		421.931

**Kondisi : 28 Juni 2022**

## Produk Hukum Tingkat Pusat

- UUD
- TAP MPR
- UU
- UU Darurat
- Pengaturan Penguasa Perang Tertinggi
- Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Kementerian
- Peraturan Lembaga Negara
- Peraturan LPNK
- Peraturan Lembaga Non Struktural
- Keputusan Menteri
- Keputusan Kepala LN
- Keputusan Kepala LPNK
- Surat Edaran

## Produk Hukum Tingkat Daerah

- Peraturan Pemerintah Provinsi
- Peraturan Pemerintah Kota
- Peraturan Pemerintah Kabupaten
- Peraturan DPRD Provinsi
- Peraturan DPRD Kota
- Peraturan DPRD Kabupaten
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Walikota
- Peraturan Bupati
- Peraturan Desa
- Peraturan Kepala Desa
- Keputusan Gubernur
- Keputusan Walikota
- Keputusan Bupati
- Keputusan Kepala Desa
- Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
- Instruksi Gubernur
- Instruksi Walikota
- Instruksi Bupati
- Keputusan Rektor
- Keputusan Dekan
- Perjanjian Kerja Sama

# Produk Hukum Kolonial

- Staatsblad
- Statuten
- Osamu Seirei
- Osamu Kanrei

# MONOGRAFI HUKUM

- Buku Hukum
- Naskah Akademik
- Naskah Akademik Kemenkumham
- Penelitian Hukum dan HAM
- Pengkajian Hukum dan HAM
- Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM
- Penelitian Hukum
- Pengkajian Hukum
- Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Thesis, dll)
- Kompendium Hukum
- Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
- Risalah Sidang Pembahasan PUU

# YURISPRUDENSI & PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
- Yurisprudensi (Mahkamah Agung - MA)
- Komisi Informasi Pusat (KIP)

## KOLEKSI PRODUK HUKUM DESA

NO	PRODUK HUKUM	JUMLAH
1	Peraturan Desa	2.188
2	Peraturan Kepala Desa	368
3	Keputusan Kepala Desa	2.330
	Jumlah	4.886

# **FOKUS 2022**

- Koleksi Data Dokumen Hukum
- Kelengkapan Meta Data
- Validitas Data
- Keamanan Data
- JDIHN sebagai Aplikasi Umum SPBE

## **TARGET KINERJA PUSAT JDIHN 2022**

**Pemetaan dan Validasi  
Data Dokumen Hukum  
Terintegrasi**



## Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Mencabut Permenkumham No. 2 Tahun 2013

“Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum”  
PERMENKUMHAM NO. 8 TAHUN 2019



Download permenkumham Nomor 8/2019

01 Standar Pembuatan Abstrak Per-UU

02 Standar Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum

03 Standar Laporan Evaluasi JDIHN

Instrumen untuk menciptakan Keseragaman Pengelolaan Bahan Dokumentasi, mempercepat Penemuan Kembali Bahan Dokumentasi, dan meningkatkan Pelayanan dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum.

## Abstrak Peraturan Perundang-undangan

### Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan

1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan, sumber, dan judul
2. Dasar Pertimbangan (meringkas dasar menimbang dan atau penjelasan umum peraturan)
3. Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, dengan cara penulisan : singkatan jenis, nomor dan tahun peraturan)
4. Materi Pokok (meringkas isi yang terkandung dalam batang tubuh)
5. Catatan (tanggal berlaku, peraturan terkait, peraturan yang dicabut/diubah)

PERMENDAGRI NO.84, BN 2014/NO.1837, 13 HALM.  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**ABSTRAK** :

- Untuk melaksanakan Pasal 19 PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan PERMENDAGRI tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2010; PERPRES No.88 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengorganisasian yang mana Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ditingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kecamatan sukarela dan terbuka, yang masa kerjanya sampai 60 tahun atau sampai diberhentikan. Tugas, hak, kewajiban dan pemberdayaan Satlinmas. Menteri melakukan pembinaan umum. Gubernur, Bupati/Walikota pembinaan teknis operasional. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota selanjutnya dilaporkan ke Gubernur kemudian ke Menteri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

**CATATAN** :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014
- Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Permen ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ini
- Lamp. : 4 hlm.

# STANDAR WEBSITE JDIH

Logo JDIH pada pojok kiri atas layar

Struktur Organisasi Pengelola JDIH

Konten/Isi dalam Aplikasi JDIH

Survey Kepuasan Masyarakat

Domain Website merupakan sub domain dari website utama instansi.  
Ex: jdih.kemendagri.go.id

Daftar Link/Alamat Website Anggota Jaringan dibawah instansinya

Alamat dan Kontak Pengelola JDIH

Advance Search engine

Tautan Link Portal JDIH\*

\*Syarat tambahan

**Standar Metadata**  
**Permenkumham 8/2019**



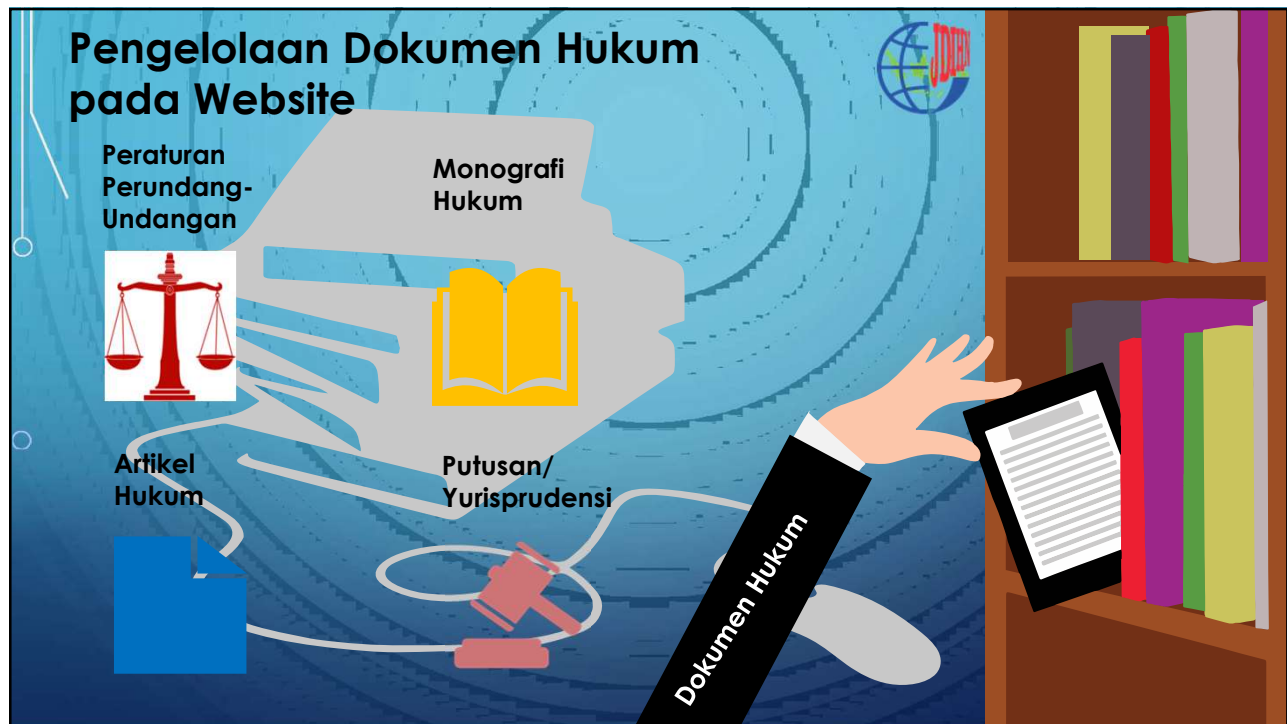
METADATA	DOKUMEN HUKUM
*Tipe Dokumen	: - Peraturan Perundang-undangan - Monografi Hukum - Artikel Hukum (majalah, koran) - Putusan Pengadilan/Yurisprudensi (Pts MA, PT, PN)
*Judul	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*T.E.U. Orang/Pengarang	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi (Lembaga)
*Nomor Peraturan/Putusan	: Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Panggil	: Monografi Hukum
*Jenis / Bentuk Monografi Hukum, Peraturan/Putusan	: Monografi Hukum, Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi (TUN, PERDATA dll)
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan	: Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Cetakan/Edisi	: Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran)
Tempat Terbit	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Penerbit	: Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

**Standar Metadata**  
**Permenkumham 8/2019**



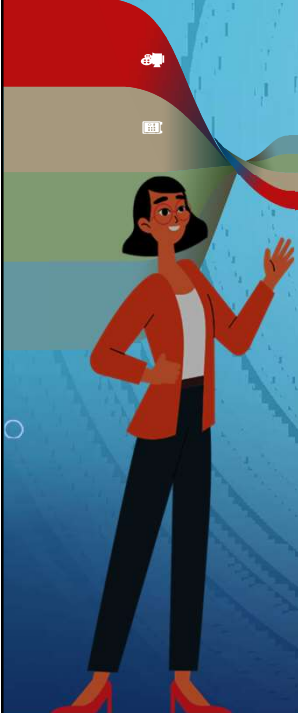
METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibacakan	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Deskripsi Fisik	: Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran)
Sumber	: Peraturan, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Subjek	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
ISBN	: Monografi Hukum
Status	: Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bahasa	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Lokasi	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bidang Hukum	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Induk Buku	: Monografi Hukum
Lampiran	: Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

\*--- tidak boleh kosong (harus diisi)



### Lembar Kerja Peraturan

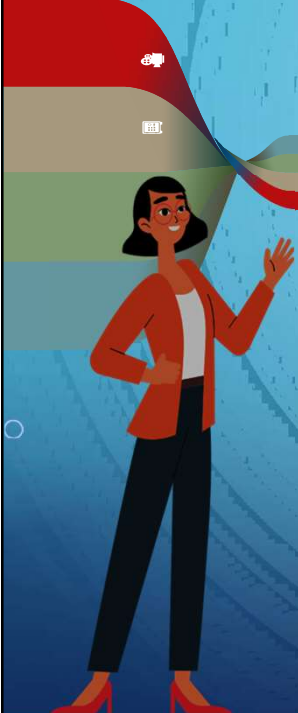
Tipe Dokumen	: Peraturan Perundang-undangan
Judul	: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
T.E. Badan/Pengarang	: Indonesia, Provinsi Jawa Timur
Nomor Peraturan	: 1
jenis / Bentuk Peraturan	: Peraturan Daerah
tingkatan Jenis/Bentuk Peraturan	: PERDA
Tempat Penetapan	: Surabaya
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan	: 22 Februari 2022 23 Februari 2022
Sumber	: LD Tahun 2022 (1 D); 16 hlm TLD Tahun 2022 (106); 4 hlm
Subjek	: BADAN HUKUM
Status Peraturan	: <b>Berlaku</b>
Bahasa	: Indonesia
Lokasi	: Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
Bidang Hukum	: Hukum Keuangan Negara
Lampiran	: Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf



Lembar Kerja Monografi Hukum	
Tipe Dokumen	: Monografi
Judul	: Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah
T.E.U. Orang/Badan	: Bratakusumah, Dedy Supriadi
Nomor Panggil	: 342.25 BRA o
Cetakan/Edisi	: Cet. 2.
Tempat Terbit	: Jakarta
Penerbit	: Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit	: 2002
Deskripsi Fisik	: xvi, 404 hlm.; 21 cm.
Subjek	: OTONOMI DAERAH
ISBN/ISSN	: ----
Bahasa	: Indonesia
Bidang Hukum	: Hukum Tata Negara
Nomor Induk Buku	2487
Lokasi Buku	: BPHN
Lampiran	: Fulltext buku (untuk terbitan tertentu)



Lembar Kerja Artikel	
Tipe Dokumen	: Artikel (majalah, koran, dll)
Judul	: Sumbangan Hukum Alam dan Pemikiran Grotius terhadap Hukum Internasional
T.E.U. Orang/Badan	: Adolf, Huala
Tempat Terbit	: Jakarta
Tahun Terbit	: 2017
Sumber	: Majalah Hukum Nasional Nomor 2
Subjek	: HUKUM ALAM (GROTIUS)
Bahasa	: Indonesia
Bidang Hukum	: Hukum Internasional
Lokasi	: BPHN
Lampiran	: Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf



Lembar Kerja Putusan Pengadilan	
Tipe Dokumen	: Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Judul	: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406K/Pdt/2017 Tahun 2017 PT Sinar Putra Murni Vs Pemerintah Kota Palu, Dkk
T.E.U. Badan	: Mahkamah Agung
Nomor Putusan	: 3406K/Pdt/2017
Jenis Peradilan	: Mahkamah Agung
Singkatan Jenis Peradilan	: MA
Tempat Peradilan	: Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun dibacakan	: 2 Maret 2018
Sumber	: Mahkamah Agung
Subjek	: PELANGGARAN ADMINISTRASI-PEMILIHAN
Status Putusan	: Tetap
Bahasa	: Indonesia
Bidang Hukum/Jenis Perkara	: Perdata
Lokasi	: BPHN
Lampiran	: Fullteks, Abstrak dan Putusan Terkait

## Contoh Input Metadata Dokumen Hukum

Berdasarkan Standar Permenkumham  
8 Tahun 2019 tentang tentang Standar  
Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum

CARA PENGISIAN METADATA PERATURAN BERDASARKAN PERMENKUMHAM 8/2019		
Metadata	Keterangan	Contoh pengisian
Tipe Dokumen		Peraturan Perundang-Undangan
Judul	Judul ditulis lengkap mulai dari: Jenis+Nomor+Tahun+tentang (judul Tidak ditulis UPPERCASE)	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
TEU Badan/Pengarang	Untuk instansi Peraturan pusat : Indonesia.Nama instansi Untuk instansi Daerah : Provinsi. Nama Daerah	Indonesia. Provinsi Jawa Timur
Nomor	Nomor peraturan ditulis tanpa ada angka 0	1
Jenis/Bentuk Peraturan	Bentuk peraturan	Peraturan Gubernur
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Singkatan Peraturan (ditulis UPPERCASE)	PERGUB
Tempat Penetapan	Tempat Peraturan ditetapkan	Surabaya
Tanggal Penetapan	Tanggal ditetapkan/diundangkan	6 Januari 2022
Sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Peraturan: Singkatan Lembar Negara/Berita Negara+ Tahun + (Nomor LN/BN) : jml halaman</li> <li>Untuk Keputusan: Dikosongkan</li> </ul>	BD Tahun 2022 (1 E); 5 hlm
Subjek	Topik/ kata kunci dari isi dokumen peraturan terduru dari 3-5 kata (ditulis huruf capital/UPPERCASE)	ASET TETAP - PENYUSUTAN
Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status Utama Peraturan hanya Berlaku dan Tidak Berlaku</li> <li>Keterangan Status ialah: mencabut, dicabut, mengubah dan diubah dan menyasar peraturan target</li> </ul>	<b>Status Peraturan: Berlaku</b> <b>Keterangan status: Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013</b>

Contoh Cara Pengisian Metadata Peraturan Berdasarkan Permenkumham 8/2019		
Metadata	Keterangan	Contoh pengisian
Bahasa	Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Bidang hukum peraturan	Hukum Keuangan Negara
Lokasi	Tempat Peraturan Fisik Disimpan	Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tahun peraturan+singkatan jenis peraturan+3 digit nomor peraturan</li> <li>-Batang tubuh, penjelasan dan lampiran harus jadi satu kesatuan (jangan di upload terpisah)</li> </ul>	Penamaan file PDF disesuaikan dengan Permenkumham 8/2019 (tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(3 digit nomor peraturan).pdf . <b>Ex: 2022pergubjatimprov001.pdf</b>

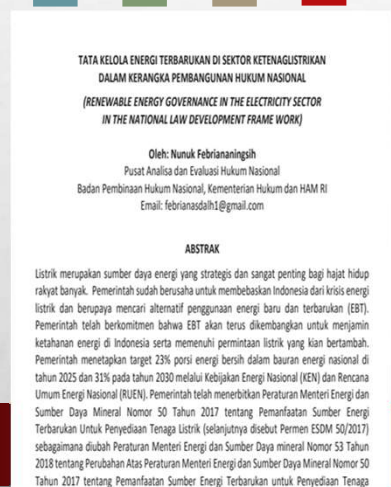
**Lanjutan Peraturan**

Contoh Cara Pengisian Metadata Monografi Hukum Berdasarkan Permenkumham 8/2019		
Metadata	Keterangan	Contoh Pengisian
Tipe Dokumen	Monografi Hukum	Monografi (Buku Hukum)
Judul	Huruf Besar hanya di awal judul, selebihnya kecil semua	Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan
Tahun terbit	Tahun terbit Buku	2008
Nomor Induk Buku	Nomor buku dalam buku induk	2487
Nomor Panggil/Klasifikasi	(nomor klasifikasi) + (3 huruf awal nama pengarang) + (huruf awal judul)	343.23 ARI m
Cetakan/Edisi	Tergantung Dokumen	Contoh; cetakan ke-II
Tempat terbit	Tempat terbit buku	Jakarta
Penerbit	Nama Penerbit	KENCANA
Deskripsi fisik	Jumlah halaman romawi pada buku, jml halaman buku.; tinggi buku	X, 253 HLM. ; 23CM
ISBN/ISSN	Nomor ISBN buku	978-979-3925-83-7
Bahasa	Bahasa yang digunakan	Indonesia
Bidang Hukum	Bidang Hukum	Hukum Pidana
Gambar Sampul	Cover buku	
TEU Orang/Badan	Nama Pengarang (tanpa gelar dan dibalik)	Arief, Barda Nawawi
Subjek	Topik/ kata kunci dari isi dokumen	MONEY LAUNDRING – KORUPSI
Lokasi	Tempat koleksi	BPHN
File Dokumen	Dikecualikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta, maka dari itu yang diupload hanya gambar cover buku	



Cover Buku

Contoh Cara Pengisian Metadata Artikel Hukum Berdasarkan Permenkumham 8/2019	
Metadata	Cara Pengisian
Tipe Dokumen	Artikel Hukum
Judul	Yang benar: tuliskan judul artikel yang terdapat dalam MHN Contoh: Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work)
Tempat Terbit/penetapan	Tempat artikel diterbitkan: Jakarta
Tahun	Tahun artikel dikeluarkan: 2019
Bahasa	Bahasa artikel: Indonesia
Sumber	Contoh pengisian yang benar : Nama Majalah (nomor edisi/vol), Tahun terbit, halaman jurnal pada majalah <b>MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56</b>
Bidang Hukum	Bidang hukum yang dibahas dalam artikel/jurnal Contoh : Hukum Administrasi Negara
Lokasi	Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi disingkat), contoh: BPHN
TEU Orang / Badan	Nama tokoh pengarang/instansi yang membuat artikel/majalah hukum (tanpa gelar dan dibalik) Contoh: Febrinaningsih, Nunuk
Subjek	Kata kunci Artikel: KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM
File Dokumen	Penamaan file Pdf.: contoh nama file : Nama Jurnal + vol/edisi+tahun+halaman jurnal <b>MHN-02-2019-29-56.pdf</b>



### Contoh Cara Pengisian Metadata Putusan Pengadilan Berdasarkan Permenkumham 8/2019

Metadata	Keterangan	Cara Pengisian
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan	Putusan Pengadilan
Judul	Judul Putusan ditulis lengkap mulai dari jenis+nomor putusan+dan pihak pemohon dan termohon	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Surya Dharma Paloh dkk (Partai NasDem) vs Komisi Pemilihan Umum
T.E.U Badan	Instansi yang mengeluarkan putusan	Indonesia, Mahkamah Konstitusi
Nomor Putusan	Nomor putusan ditulis lengkap	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Jenis Peradilan	Jenis Peradilan	Mahkamah Konstitusi
Singkatan Jenis Peradilan	Singkatan Jenis Peradilan	MK
Tempat Peradilan	Tempat Pengadilan	Jakarta
Tanggal dibacakan	Tanggal dibacakan putusan	9 Agustus 2019
Sumber	Jenis Peradilan	Mahkamah Konstitusi

### Contoh Cara Pengisian Metadata Putusan Pengadilan Berdasarkan Permenkumham 8/2019

Metadata	Keterangan	Cara Pengisian
Subjek	Kata Kunci Putusan/Topik	PERSELISIHAN - HASIL PEMILU
Status Putusan	AMAR Putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Bahasa	Bahasa Putusan	Indonesia
Bidang Hukum/Jenis Perkara	Bidang Hukum	Hukum Pemilihan Umum
Lokasi	Lokasi Salinan fisik beada	Lokasi tempat Salinan File Fisik berada Contoh: Jakarta
Lampiran	Nama file lampiran 4 digit tahun putusan+singkatan peradilan+4 digit kode wilayah+nomor putusan	Contoh: 2019MK3102194-05-33_PHPU.DPR-DPRD_XVII_2019

Lanjutan Putusan

## INTEGRASI ANGGOTA



Application programming interface adalah jembatan yang menghubungkan 2 system aplikasi yang berbeda

API akan melakukan pengambilan data berdasarkan log aktifitas database anggota, dan server anggota ke server JDHN

API akan bekerja apabila ada aktifitas (create, update, delete)

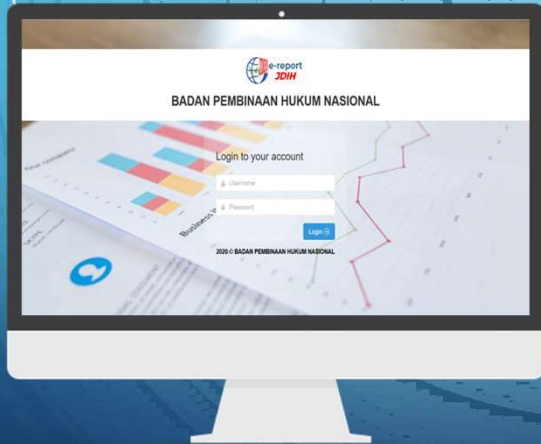


## E-Report Pelaporan Tahunan



# Laporan Tahunan Pengelolaan JDIH

<https://e-report.jdih.go.id/>



Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting JDIHN


Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember [Perpres 33/2012 ttg JDIHN, Pasal 10 ayat (2) huruf f]

Masukkan ID/User Name yaitu Nama Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Masukkan password standar yaitu : \$Er3p0rTHing//

2020 © BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

## Bentuk Kegiatan yang dapat dilaksanakan

- 
1. Pengelolaan JDIH
  2. Koordinasi/Konsultasi JDIH
  3. Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan JDIH
  4. Mengikuti/Menghadiri Kegiatan JDIHN
  5. Rapat Koordinasi JDIH
  6. BIMTEK/FGD/Sosialisasi JDIH
  7. Promosi JDIH dan Lomba Menulis Artikel
  8. Penilaian Anggota JDIH Terbaik (oleh Pusat JDIH)
  9. Pengadaan Buku Hukum
  10. Peningkatan Sarana/Prasarana

## **EVALUASI PENGELOLAAN JDIH Provinsi Jawa Timur**



JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL API Integrasi	Status URL API	E-Report
	1	Provinsi Jawa Timur	1620	2019-08-02	<a href="https://dokumjdih.jatimprov.go.id/integrasi.php">https://dokumjdih.jatimprov.go.id/integrasi.php</a>	Tidak Aktif	Sudah
	2	Kota Batu	4	2020-09-04	<a href="http://jdihprokum.batukota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://jdihprokum.batukota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Sudah
	3	Kota Blitar	30	2022-02-09	<a href="http://jdihprokum.blitarkota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://jdihprokum.blitarkota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Belum
	4	Kota Kediri	713	2020-08-25	<a href="https://jdih.kedirikota.go.id/Integrasi/serve">https://jdih.kedirikota.go.id/Integrasi/serve</a>	Aktif	Belum
	5	Kota Madiun	439	2022-02-10	<a href="http://dokum.madiunkota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://dokum.madiunkota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Sudah
	6	Kota Malang	575	2021-05-18	<a href="https://jdih.malangkota.go.id/public/integrasi.php">https://jdih.malangkota.go.id/public/integrasi.php</a>	Aktif	Sudah
	7	Kota Mojokerto	834	2021-12-31	<a href="http://jdih.mojokertokota.go.id/integrasi_mojokerto.php">http://jdih.mojokertokota.go.id/integrasi_mojokerto.php</a>	Aktif	Belum
	8	Kota Pasuruan	651	2022-02-08	<a href="https://dokum.pasurukota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">https://dokum.pasurukota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Belum
	9	Kota Probolinggo	4	2020-08-26	<a href="http://dokum.probolinggokota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://dokum.probolinggokota.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Sudah
10	Kota Surabaya	2774	2021-12-30	<a href="https://jdih.surabaya.go.id/integrasi_jdihn.php">https://jdih.surabaya.go.id/integrasi_jdihn.php</a>	Aktif	Belum	

JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL API Integrasi	Status URL API	E-Report
	11	Kabupaten Bangkalan	4	2020-09-14	<a href="http://kabbangkalan.jdih.jatimprov.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://kabbangkalan.jdih.jatimprov.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Tidak Aktif	Belum
	12	Kabupaten Banyuwangi	10400	2021-07-26	<a href="https://dinsos.banyuwangikab.go.id/jdih.php">https://dinsos.banyuwangikab.go.id/jdih.php</a>	Aktif	Sudah
	13	Kabupaten Blitar	427	2022-03-23	<a href="http://arsip.jdih.blitarkab.go.id/sinkron/integrasi_dokum.php">http://arsip.jdih.blitarkab.go.id/sinkron/integrasi_dokum.php</a>	Aktif	Sudah
	14	Kabupaten Bojonegoro	4	2020-09-16	<a href="http://jdih.bojonegorokab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://jdih.bojonegorokab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Belum
	15	Kabupaten Bondowoso	4	2020-09-09	<a href="http://dokum.bondowosokab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://dokum.bondowosokab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Tidak Aktif	Belum
	16	Kabupaten Gresik	1037	2022-06-02	<a href="http://jdih.gresikkab.go.id/service/regional-legislations/jdihn">http://jdih.gresikkab.go.id/service/regional-legislations/jdihn</a>	Aktif	Sudah
	17	Kabupaten Jember	4	2020-09-12	<a href="http://dokum.jemberkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://dokum.jemberkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Belum
	18	Kabupaten Jombang	1427	2019-10-29	<a href="http://jdih.jombangkab.go.id/integrasi_Jombang.php">http://jdih.jombangkab.go.id/integrasi_Jombang.php</a>	Tidak Aktif	Sudah
	19	Kabupaten Kediri	4	2020-08-27	<a href="https://jdihdokum.kedirikab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">https://jdihdokum.kedirikab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Tidak Aktif	Belum
20	Kabupaten Lamongan	2	2020-08-28	<a href="http://jdih.lamongankab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php">http://jdih.lamongankab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php</a>	Aktif	Sudah	

No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
21	Kabupaten Lumajang	644	2021-06-15	https://jdih.lumajangkab.go.id/bp_hn_ws/integrasi	aktif	Belum
22	Kabupaten Madiun	4	2020-09-04	http://dokum.madiunkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Sudah
23	Kabupaten Magetan	4	2020-08-27	http://jdih-prokum.magetan.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Sudah
24	Kabupaten Malang	4	2020-08-28	http://jdihdokum.malangkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Belum
25	Kabupaten Mojokerto	138	2021-06-18	http://jdih.mojokertokab.go.id/sync3b.php	Tidak aktif	Sudah
26	Kabupaten Nganjuk	4	2020-09-04	http://jdihprokum.nganjukkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Belum
27	Kabupaten Ngawi	4	2020-09-16	http://dokum.ngawikab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Belum
28	Kabupaten Pacitan	6	2020-08-27	http://jdihdokum.pacitankab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Belum
29	Kabupaten Pamekasan	4	2020-08-27	http://jdihdokum.pamekasankab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	aktif	Belum
30	Kabupaten Pasuruan	503	2019-12-20	http://www.jdih.pasuruankab.go.id/syncx/syncpass.php	Tidak aktif	Sudah

No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
31	Kabupaten Ponorogo	661	2020-12-30	https://jdihprokum.ponorogo.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	Aktif	Sudah
32	Kabupaten Probolinggo	593	2021-11-06	https://jdih.probolinggakab.go.id/integrasi.php	Aktif	Belum
33	Kabupaten Sampang	4	2020-08-26	http://jdih.sampangkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	Aktif	Sudah
34	Kabupaten Sidoarjo	1413	2019-12-20	http://jdih.sidoarjokab.go.id/jdhn/Integrasi.php	Aktif	Sudah
35	Kabupaten Situbondo	4	2020-09-04	http://dokum.situbondokab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	Aktif	Sudah
36	Kabupaten Sumenep	213	2020-09-04	http://jdih.sumenepkab.go.id/integrasi_jdhn.php	Aktif	Belum
37	Kabupaten Trenggalek	4	2020-09-04	http://dokum.trenggalekkab.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	Aktif	Sudah
38	Kabupaten Tuban	1696	2019-06-13	https://jdih.tubankab.go.id/sinkron/integrasi.php	Tidak Aktif	Sudah
39	Kabupaten Tulungagung	6	2020-08-28	http://jdihprokum.tulungagung.go.id/sinkron/syncnonstandar.php	Aktif	Belum
40	DPRD Provinsi Jawa Timur	23	2020-09-14	https://jdih.dprd.jatimprov.go.id/web/syncx/rev-syncx.php	Aktif	Belum

JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
	41	DPRD Kota Batu	2	2020-09-14	<a href="https://jdih-dprdbatukota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdbatukota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	42	DPRD Kota Blitar	79	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdblitarkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdblitarkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	43	DPRD Kota Kediri	6	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdkedirikota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdkedirikota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	44	DPRD Kota Madiun	5	2020-09-14	<a href="https://jdih-dprdmadiunkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdmadiunkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	45	DPRD Kota Malang	6	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdmalangkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdmalangkota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	46	DPRD Kota Mojokerto	5	2021-12-31	<a href="https://jdih-dprd.mojokertokota.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprd.mojokertokota.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	47	DPRD Kota Pasuruan	4	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdpasruankota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdpasruankota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	48	DPRD Kota Probolinggo	65	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprprobolinggokota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprprobolinggokota.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	49	DPRD Kota Surabaya	3	2020-09-16	<a href="https://jdih-dprdsurabaya.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdsurabaya.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
50	DPRD Kabupaten Bangkalan	6	2020-09-17	<a href="https://jdih-dprdbangkalankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdbangkalankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum	

JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
	51	DPRD Kabupaten Banyuwangi	2	2020-09-20	<a href="https://jdih-dprdbanyuwangikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdbanyuwangikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	52	DPRD Kabupaten Blitar	2	2020-09-17	<a href="https://jdih-dprdblitarkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdblitarkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	53	DPRD Kabupaten Bojonegoro	7	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdbojonegorokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdbojonegorokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	54	DPRD Kabupaten Bondowoso	4/21	2020-09-08	<a href="https://jdih-dprdbondowosokab.jatimprov.go.id/syncx/bondowoso_defaultx.php">https://jdih-dprdbondowosokab.jatimprov.go.id/syncx/bondowoso_defaultx.php</a>	Aktif	Belum
	55	DPRD Kabupaten Gresik	6	2022-06-28	<a href="https://jdih-dprdgresikkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdgresikkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	56	DPRD Kabupaten Jember	9	2021-10-13	<a href="https://jdih-dprdjemberkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdjemberkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	57	DPRD Kabupaten Jombang	10/16	2020-09-17	<a href="https://jdih-dprdjombangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdjombangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	58	DPRD Kabupaten Kediri	4/9	2020-09-17	<a href="https://jdih-dprdkedirikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://jdih-dprdkedirikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	59	DPRD Kabupaten Lamongan	13	2020-09-14	<a href="http://jdih-dprd.lamongankab.go.id/setwanlamongan_sync.php">http://jdih-dprd.lamongankab.go.id/setwanlamongan_sync.php</a>	Tidak Aktif	Belum
60	DPRD Kabupaten Lumajang	8/9	2020-09-17	<a href="https://jdih-dprdlumajangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel">https://jdih-dprdlumajangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel</a>	Aktif	Belum	

JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
	61	DPRD Kabupaten Madiun	4/8	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdmadiunkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdmadiunkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	62	DPRD Kabupaten Magetan	2/3	2020-09-14	<a href="https://idih-dprdmagetankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdmagetankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	63	DPRD Kabupaten Malang	7/184	2020-09-15	<a href="https://idih-dprdmalangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdmalangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	64	DPRD Kabupaten Mojokerto	2/3	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdmojokertokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdmojokertokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	65	DPRD Kabupaten Nganjuk	12/40	2020-09-08	<a href="https://idih-dprdnganjukkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdnganjukkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	66	DPRD Kabupaten Ngawi	2/31	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdngawikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdngawikab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	67	DPRD Kabupaten Pacitan	4/22	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdpacitankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdpacitankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	68	DPRD Kabupaten Pamekasan	2/114	2020-11-19	<a href="http://sekwan.pamekasankab.go.id/api/prodhukum">http://sekwan.pamekasankab.go.id/api/prodhukum</a>	Aktif	Belum
	69	DPRD Kabupaten Pasuruan	4/9	2020-09-14	<a href="https://idih-dprdpasruankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdpasruankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
70	DPRD Kabupaten Ponorogo	3	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdponorogokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdponorogokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum	

JAWA TIMUR	No	Instansi	Jmlh Dok (last sync)	Last Sync Sukses	URL Web	Status URL API	E-Report
	71	DPRD Kabupaten Probolinggo	2/3	2020-09-17	<a href="https://idih-dprdprobolinggokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdprobolinggokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	72	DPRD Kabupaten Sampang	3	2020-09-14	<a href="https://idih-dprdsampangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdsampangkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	73	DPRD Kabupaten Sidoarjo	4	2020-09-14	<a href="https://idih-dprdsidoarjokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdsidoarjokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Sudah
	74	DPRD Kabupaten Situbondo	4	2020-09-14	<a href="https://idih-dprdsitubondokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdsitubondokab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	75	DPRD Kabupaten Sumenep	2	2020-09-17	<a href="https://idih-dprdsumenepkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdsumenepkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	76	DPRD Kabupaten Trenggalek	2/7	2020-09-17	<a href="https://idih-dprdtrenggalekkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdtrenggalekkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	77	DPRD Kabupaten Tuban	2	2020-09-17	<a href="https://idih-dprdtubankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdtubankab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum
	78	DPRD Kabupaten Tulungagung	4	2020-09-16	<a href="https://idih-dprdtulungagungkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php">https://idih-dprdtulungagungkab.jatimprov.go.id/integrasi/sampel_API.php</a>	Aktif	Belum

# Pengelolaan JDIH dalam Kerangka SPBE dan REFORMASI BIROKRASI

## JDIH DALAM PENILAIAN SPBE



Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE




Peraturan Menteri PAN&RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (mencabut Peraturan Menteri PAN&RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE)




Domain 4 : Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)




Indikator 44 : Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan bobot 3,00



# APLIKASI JDIIH SEBAGAI APLIKASI UMUM SPBE





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 381 /M.KT.03/2021 14 Juni 2021  
Sifat : Segera  
Hal : Usulan Penetapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Aplikasi Umum SPBE

YTH. BAPAK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DI  
TEMPAT

Dalam Perpres juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing.

4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kami usulkan SJDIIH dapat menjadi aplikasi umum yang dapat ditetapkan oleh Menteri PANRB di tahun 2021 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi wali layanan SPBE untuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga dapat menjadi langkah percepatan transformasi digital nasional berupa terciptanya bagian dari layanan administrasi pemerintahan digital terintegrasi

## INDEKS REFORMASI HUKUM

### VARIABEL :

- I. Tingkat koordinasi kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
- II. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas (bobot 25%)
- III. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%)
- IV. Tingkat penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangan-undangan (bobot 15%)

**VARIABEL IV**

Tingkat Penyederhanaan Regulasi pada setiap Jenjang Level Peraturan Perundangan-undangan

Terbangunnya JDIH yang  
terintegrasi dengan portal  
JDIHN

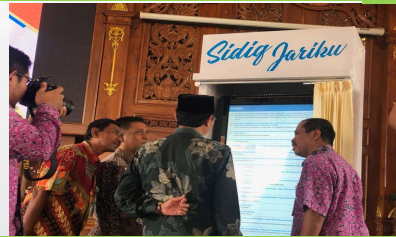
**RAGAM INOVASI  
ANGGOTA JDIHN**



# Ragam Inovasi Anggota JDIHN

Kabupaten Tuban

Kabupaten Garut



Kabupaten Banyuwangi

Kota Sukabumi



# RAGAM INOVASI ANGGOTA JDIHN

## MARS JDIH BANYUWANGI



# JDIH Masuk Desa (Kab. Banyuwangi)



# WARUNG JDIH DPRD KOTA BANDUNG







## JDIH ON VIDEOTRON (KOTA BATAM)



**PENGHARGAAN JDIHN  
“JDIHN AWARDS”**



## ASPEK-ASPEK YANG DINILAI & BOBOT NILAI

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT NILAI	KETERANGAN
1	ORGANISASI / KELEMBAGAAN	4	4 indikaor
2	SUMBER DAYA MANUSIA	2	2 indikator
3	KOLEKSI DOKUMEN HUKUM	7	4 indikator
4	TEKNIS PENGELOLAAN	15	4 indikator
5	SARANA PRASARANA	4	2 indikator
6	PEMANFATAAN T.I.K.	59	10 indikator
7	INOVASI	9	6 indikator
	TOTAL	100	32 indikator

Website JDIH = 25

Integrasi Website = 25

Pelaporan (e-report) = 10

### 32 INDIKATOR YANG DINILAI ■ ■ ■

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Dasar Hukum (1)                                 | 12. SOP (1)  | 24. Fitur keamanan website (1)                              |
| 2. Struktur Organisasi (1)                         | 13. Standar Metadata (2)                             | 25. Aplikasi JDIH Mobile (Android, IOS) (2)                 |
| 3. Tim Pengelola (1)                               | 14. Abstrak (2)                                      | 26. Kios Informasi Elektronik JDIH (1)                      |
| 4. Kontak (1)                                      | 15. Ruang JDIH / Perpustakaan Hukum (2)              | 27. Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media elektronik (1) |
| 5. Data Pengelola JDIH (1)                         | 16. Alat Pengolah Data & Akses Internet (2)          | 28. Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media social (2)     |
| 6. Data Kegiatan yg diikuti (1)                    | 17. Website JDIH (25)                                | 29. Pemanfaatan informasi melalui website (1)               |
| 7. Koleksi PUU (3)                                 | 18. Integrasi Website JDIH dengan Portal JDIHN (25)  | 30. Kegiatan Rakor / Bimtek (2)                             |
| 8. Koleksi Non PUU (2)                             | 19. Logo JDIHN (1)                                   | 31. Kegiatan Benchmarking (1)                               |
| 9. Koleksi Dokumen Langka (1)                      | 20. Fitur Search Engine (1)                          | 32. Inovasi lain yg relevan (2)                             |
| 10. Terjemahan Dok Hukum dalam Bahasa Asing (1)    | 21. Fitur SKM (1)                                    |   |
| 11. Penyampaian laporan melalui e-Report JDIH (10) | 22. Hyperlink ke Portal JDIHN (1)                    |   |
|  | 23. Hyperlink dari website utama ke website JDIH (1) |   |


## **PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH**

- Seluruh Anggota JDIHN yg sudah memiliki website
- 4 Kategori / Tingkat :
  - I. CATUR DANDANI : Nilai 0 – 25**
  - II. TRI BUNTARA : Nilai 26 – 50**
  - III. DWI TUNGGGA : Nilai 51 – 75**
  - IV. EKA ACALAPATI : Nilai 76 – 100**

## **DASAR HUKUM**

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID Tahun 2020
- **Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021**
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.04.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2020

**JDIHN Awards 2021**



**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021**


**TINGKAT KEMENTERIAN**

★ ★ ★ ★ ★

JDIHN.GO.ID

1. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian Ketenagakerjaan
5. Kementerian Keuangan

**JDIHN Awards 2021**



**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021**


**TINGKAT LEMBAGA NEGARA**

★ ★ ★ ★ ★

JDIHN.GO.ID

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Ombudsman RI
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT LEMBAGA PEMERINTAH  
NON-KEMENTERIAN**  
★ ★ ★ ★ ★

JDIHN.GO.ID

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2. Perpustakaan Nasional RI
3. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Radio Republik Indonesia
5. Arsip Nasional RI

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT LEMBAGA NON-STRUKTURAL**  
★ ★ ★ ★ ★

JDIHN.GO.ID

1. Komisi Pemilihan Umum RI
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
PROVINSI**  
★★★★★

JDIHN.GO.ID

- 1. Jawa Barat**
- 2. Jawa Tengah**
- 3. Jawa Timur**
- 4. Bali**
- 5. Sulawesi Barat**

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
KABUPATEN**  
★★★★★

JDIHN.GO.ID

- 1. Banyuwangi**
- 2. Sukoharjo**
- 3. Batang**
- 4. Sumedang**
- 5. Wonosobo**
- 6. Sleman**
- 7. Tuban**
- 8. Cianjur**
- 9. Kendal**
- 10. Semarang**

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
KOTA  
★★★★★**

JDIHN.GO.ID

1. Sukabumi
2. Banjarmasin
3. Surakarta
4. Bandung
5. Bekasi

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI  
★★★★★**

JDIHN.GO.ID

1. Sekretariat DPRD  
Provinsi Lampung
2. Sekretariat DPRD  
Jawa Tengah

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
★★★★★**

JDIHN.GO.ID

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Batang
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

**JDIHN Awards 2021**




**PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021  
TINGKAT  
SEKRETARIAT DPRD KOTA  
★★★★★**

JDIHN.GO.ID

1. Sekretariat DPRD Kota Batam
2. Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan

JDIHN Awards 2021




PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JDIHN TERBAIK  
TAHUN 2021

TINGKAT  
PERPUSTAKAAN HUKUM

★★★★★

JDIHN.GO.ID


1. Universitas Bandar Lampung (Prov. Lampung)
2. Universitas Pamulang (Prov. Banten)
3. Universitas Sam Ratulangi (Prov. Sulawesi Utara)



Cari  
Dokumen  
Hukum?

JDIHN.GO.ID

saja



Informasi lebih lanjut,  
kunjungi **media sosial** kami

- [jdih nasional](#)
- [jdihnindonesia](#)
- [jdihnindonesia](#)
- [jdihn Indonesia](#)

TERIMA KASIH